



Kontribusi Kecerdasan Buatan dalam Mewujudkan Pemahaman Nilai Pancasila di Era Modern

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Ashfiya Nur Atqiya², Sinta Nirmala³,
Ahmad Natsir Fairus Ilyas⁴, Laila Nur Kusuma⁵, Anastya Salsabila Putri⁶

¹ Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia,

³⁻⁶ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,

Jawa Tengah 57168, Indonesia

*Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id, ashfiy.anura@gmail.com, sintanirmala703@gmail.com
; fairuzilyas09@gmail.com⁴, lailanurkusuma93@gmail.com⁵,
putrisalsabila71512@gmail.com⁶

Abstrack The use of Artificial Intelligence (AI) has now become one of the crucial aspects in the advancement of information technology throughout the world. This article aims to connect the values of Pancasila as the moral basis of the Indonesian nation with the ethics of using artificial intelligence and its impact on the country. As the philosophical foundation of the state, Pancasila contains deep ethical values and can be used as guidelines in the application of AI that are in line with the moral and ethical principles that apply in Indonesia. Pancasila education has an important role as an ethical framework in the context of the development and application of AI. In this article, we will discuss the application of Pancasila values in technological developments so that they remain in line with the nation's identity, as well as explore the various positive and negative impacts that may arise from the use of AI. Furthermore, this study seeks solutions that can be implemented by the government, companies, and society to overcome these negative impacts. Using a descriptive qualitative approach, this study aims to explore and understand in depth the relationship between Pancasila values and ethics in the use of AI, especially in the context of the development of information technology in Indonesia. This approach is very appropriate for examining social phenomena, values, and meanings contained in policies or implementation of technology in society.

Keywords: Artificial Intelligence, Information Technology Development, Pancasila

Abstrak Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) kini telah menjadi salah satu aspek krusial dalam kemajuan teknologi informasi di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk menghubungkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral bangsa Indonesia dengan etika penggunaan kecerdasan buatan serta dampaknya di tanah air. Sebagai landasan filosofis negara, Pancasila mengandung nilai-nilai etika yang mendalam dan dapat dijadikan pedoman dalam penerapan AI yang sejalan dengan prinsip moral dan etika yang berlaku di Indonesia. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting sebagai kerangka etika dalam konteks pengembangan dan penerapan AI. Artikel ini, kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan teknologi agar tetap sejalan dengan identitas bangsa, serta mengeksplorasi berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan AI. Lebih jauh lagi, penelitian ini mencari solusi yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan etika dalam penggunaan AI, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Pendekatan ini sangat tepat untuk meneliti fenomena sosial, nilai-nilai, dan makna yang terkandung dalam kebijakan atau implementasi teknologi di masyarakat.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Pancasila, Perkembangan Teknologi Informasi

1. PENDAHULUAN

Di era digital yang berkembang pesat saat ini, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi AI yang semakin kompleks juga membawa serta berbagai dilema etis terkait penerapannya. Saat ini,

teknologi digital berfungsi sebagai sumber utama dalam hampir setiap aktivitas manusia modern. (Santo Gitakarma & Tjahyanti, 2022).

Perubahan teknologi dewasa ini tidak dapat dihindari dan telah menjadi elemen utama dalam kehidupan manusia kontemporer. Perkembangan zaman yang terus berlangsung menuntut manusia untuk cepat beradaptasi. Oleh sebab itu, seluruh sektor kehidupan termasuk regulasi dan etika sosial harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut agar nilai-nilai budaya tetap terjaga. Saat ini, AI hadir sebagai alat bantu penting dalam memperoleh informasi global secara cepat dan efisien (Pabubung, 2023).

Kecerdasan Buatan, atau AI, sebagai salah satu cabang ilmu komputer, memberikan kemampuan kepada mesin untuk melaksanakan tugas-tugas yang meniru kemampuan manusia. (Ririh et al., 2020). Penelitian Bullock (2019) mengemukakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan, komputer unggul dalam kondisi yang jelas dan sederhana, sedangkan manusia lebih handal dalam menangani persoalan yang kompleks dan penuh ketidakpastian. AI kini telah memberi dampak besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, manufaktur, dan layanan publik. Perkembangannya ditujukan untuk terus memberikan solusi yang lebih baik di masa mendatang (Devianto & Dwiasnati, 2020). Di Indonesia, AI terus berkembang dan menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan.

Sebagai negara yang kaya dengan budaya serta nilai-nilai lokal, Indonesia perlu merenungkan penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip luhur yang dimiliki. Pancasila sebagai fondasi moral bangsa memiliki posisi penting dalam membimbing arah pengembangan teknologi AI agar sesuai dengan karakter bangsa Indonesia (Ramdhani et al., 2022). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menelaah keterkaitan antara etika, nilai-nilai Pancasila, dan pemanfaatan teknologi AI di Indonesia (Ratri & Najicha, n.d.).

Transformasi digital juga membuka peluang untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Menurut Sujarwo et al. (2024), Teknologi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan, seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong, melalui platform digital seperti media sosial. Selain itu, nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan hingga pendidikan dan budaya sosial.

Namun, era digital juga menghadirkan tantangan etis baru. Safitri et al. (2024) menekankan pentingnya membangun kembali kerangka etika berdasarkan Pancasila untuk menjawab pergeseran nilai dalam masyarakat digital. Misalnya, sila kedua Pancasila dapat

menjadi dasar dalam menanggulangi cyberbullying dan ujaran kebencian, sedangkan sila kelima relevan untuk menjawab ketimpangan akses teknologi di wilayah tertinggal.

Era Society 5.0 membawa tantangan baru dalam penerapan Pancasila. Nasution et al. (2024) menyatakan bahwa dalam menghadapi pergeseran nilai sosial akibat digitalisasi, diperlukan pendekatan kebijakan berbasis nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang mendorong keadilan sosial, inklusi digital, serta pelestarian identitas nasional.

Penting untuk memandang Pancasila sebagai ideologi yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Furnamasari et al. (2024) menegaskan bahwa nilai-nilai seperti musyawarah dan gotong royong dapat diintegrasikan melalui kolaborasi digital dan diskusi virtual, yang kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, era digital menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Di satu sisi, teknologi dapat memperkuat identitas bangsa dan memperluas penyebaran nilai-nilai luhur. Di sisi lain, isu-isu seperti penyebaran hoaks, degradasi moral, dan pengaruh budaya luar memerlukan penanganan serius. Oleh karena itu, integrasi Pancasila dalam ruang digital menjadi langkah penting untuk menjaga harmoni antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai bangsa.

Pancasila tetap relevan sebagai panduan strategis dalam menghadapi tantangan zaman digital. Melalui pendekatan pendidikan, pembaharuan etika, dan peningkatan literasi digital, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analitis. Dalam pelaksanaannya, penting untuk memastikan bahwa pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia tetap berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi moral dan etis. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya risiko seperti dehumanisasi maupun penyimpangan dalam pemanfaatan teknologi modern (Rachmawati, 2021).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis dalam pemanfaatan teknologi AI yang bijak dan bertanggung jawab. Informasi yang digunakan diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan tulisan akademik yang membahas isu seputar Pancasila, etika, dan kecerdasan

buatan. Semua data yang terkumpul dianalisis secara sistematis dan dikompilasi untuk membangun pemahaman yang komprehensif sebelum mencapai kesimpulan. (Nathaniel Steave Harjanto, 2024).

Pemilihan metode ini bertujuan untuk mengungkap keterkaitan antara prinsip-prinsip Pancasila dan etika dalam penggunaan AI di Indonesia, sekaligus menelaah dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui riset kepustakaan, yang meliputi kajian mendalam terhadap literatur akademik, buku referensi, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan pendekatan pengembangan teknologi AI yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang berakar dari Pancasila. Hal ini diharapkan dapat mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Pancasila

Pancasila, yang merupakan hasil pemurnian dari nilai-nilai budaya, sosial, dan pranata masyarakat Indonesia, telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan bangsa sejak awal berdirinya negara. Sebagai dasar negara yang sah secara konstitusional, Pancasila berperan sebagai pedoman hidup, fondasi ideologi nasional, serta acuan moral dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak pengesahannya, Indonesia telah melalui berbagai tantangan dan ujian, baik dari sisi internal maupun eksternal. Namun, keteguhan pada nilai-nilai Pancasila telah membuktikan kematangan dan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi gelombang globalisasi (Mubyarto, 1991).

Pancasila merupakan sistem filsafat yang bersifat terbuka dan dinamis. Salah satu contohnya, sila kelima mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterapkan secara luas. Di Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan khusus sebagai ideologi nasional, landasan konstitusional, serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat konkret dan dapat dijadikan pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Supaya nilai-nilai tersebut dapat membentuk masyarakat yang berkarakter dan berperilaku sesuai dengan semangat Pancasila, diperlukan peran aktif dari seluruh elemen bangsa untuk mengamalkannya secara konsisten. Dengan demikian, cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Namun, pada kenyataannya, masih banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memahami esensi Pancasila, dan implementasinya belum berjalan dengan optimal. (Ashfiya Nur Atqiya, 2024).

Pancasila tidak hanya berperan sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai fondasi bersama dalam melawan berbagai persoalan bangsa yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Pancasila berperan sebagai landasan filosofis dan pandangan hidup bangsa, yang menjadi pijakan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga diakui sebagai hukum tertinggi di Republik Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman penting bagi pemerintah. (Nasoha, 2025).

Kata "ideologi" terdiri dari dua unsur, yaitu "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita, dan "logos" yang berarti ilmu. Secara etimologis, istilah "idea" berakar dari bahasa Yunani "eidos" yang berarti bentuk, serta "idein" yang berarti melihat. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gagasan-gagasan dasar atau sistem cita-cita. Dalam kehidupan sehari-hari, ideologi sering kali dipahami sebagai cita-cita yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Cita-cita ini berfungsi sebagai pandangan hidup yang ingin dicapai secara konsisten. Secara historis, istilah "ideologi" pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh asal Prancis, Destutt de Tracy, pada tahun 1796. (Darmodihardjo & Shidarta, 2006).

Konsep Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Pancasila, yang berasal dari bahasa Sanskerta, mengandung makna sebagai prinsip atau fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai acuan dalam seluruh kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya (Olsep, A. 2015).

Muhammad Yamin menjelaskan bahwa istilah Pancasila terdiri dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Kata "Panca" berarti "lima," sementara "Syila" mengartikan "batu sendi" atau dapat diartikan sebagai lima dasar utama. (Yamin, Pembahasan UUD RI).

Presiden Soekarno pernah menerapkan nilai-nilai Pancasila pada tahun 1960 (Bunyamin, 2008). Dalam gagasannya, Soekarno merumuskan lima prinsip utama yang harus dimiliki oleh Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kelima prinsip tersebut meliputi: nasionalisme (kebangsaan), kemanusiaan (internasionalisme), musyawarah (permufakatan), keadilan sosial, serta ketuhanan yang berpadu dengan nilai budaya. Kelima prinsip ini kemudian dikenal sebagai Pancasila dan diajukan oleh Soekarno sebagai dasar pandangan hidup (Weltanschauung) bangsa Indonesia yang merdeka (Agustinus, W. D. 2015).

Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pedoman hidup bagi seluruh warga negara. Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bangsa, lambang persatuan, serta sebagai pelindung bagi kelangsungan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Kelima sila di dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip fundamental tentang manusia dan berbagai aspek kehidupan yang kebenarannya dipercaya oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut berakar dari karakter dan budaya bangsa yang menjadi pijakan utama dalam pembentukan negara Indonesia (Kaelan, 1996: 92). Selanjutnya, kita akan mengulas makna dari nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila. (Jesika Indrian, 2024).

Tantangan Pancasila Di Era Digital

Salah satu tantangan utama Pancasila di era digital adalah masuknya pengaruh ideologi asing yang dapat mengancam keberadaan serta nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi melalui internet memungkinkan penyebaran ideologi dari luar negeri berlangsung sangat cepat di tengah masyarakat. Situasi ini berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika ideologi asing bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini dapat menyebabkan pergeseran cara berpikir, merusak semangat nasionalisme, bahkan memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa.

Lebih lanjut, penyebaran ideologi asing berpotensi menimbulkan konflik sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai tingkat, baik di lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat secara luas. Selain itu, penting pula untuk menanamkan karakter dan identitas bangsa melalui pelestarian budaya dan seni yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi arus informasi di dunia digital. Pengawasan terhadap konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan, termasuk dengan mendorong sektor media dan teknologi untuk menciptakan solusi yang dapat membatasi penyebaran informasi yang merusak.

Dengan memperkuat pemahaman ideologi Pancasila, serta melakukan pengendalian terhadap pengaruh ideologi asing, Indonesia dapat menghadapi tantangan di era digital, menjaga semangat kebangsaan, dan memperkuat persatuan nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak dini, guna membentuk jiwa nasionalisme yang kuat. (Ilmiah et al., 2022).

Di era digital, upaya memperkuat jati diri bangsa menghadapi tantangan yang semakin rumit. Meski teknologi digital memudahkan komunikasi dan memperluas interaksi global, hal ini juga membawa risiko terhadap persatuan bangsa dan bisa melemahkan rasa nasionalisme.

Salah satu penyebabnya adalah masuknya pengaruh budaya asing melalui media digital, yang secara perlahan dapat mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Apabila budaya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai serta budaya nasional, maka identitas bangsa berpotensi tergerus.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak negatif terhadap keutuhan bangsa serta citra Indonesia di mata dunia. Untuk menghadapi tantangan ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peran vital identitas nasional sebagai faktor pemersatu bangsa. Langkah konkret yang bisa diambil adalah dengan memperkenalkan serta menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, baik melalui kurikulum pendidikan maupun kegiatan sosial di tengah masyarakat.

Melalui upaya tersebut, masyarakat dapat memperkuat solidaritas dan membentuk karakter bangsa yang kokoh. Singkatnya, memperkuat jati diri bangsa di era digital membutuhkan kolaborasi serta kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai dan budaya nasional, Indonesia dapat memperkuat identitasnya serta membangun citra positif di dunia internasional.

Konten digital yang bersifat asusila seperti pornografi, kekerasan, serta penyebaran penipuan dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Jenis konten ini berpotensi merusak moral serta nilai-nilai Pancasila yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa. Dampaknya pun cukup signifikan terhadap cara berpikir dan pandangan hidup masyarakat, khususnya kalangan muda. Oleh karena itu, generasi muda perlu diarahkan dan didukung oleh lingkungan sosial agar mampu menggunakan teknologi digital secara positif dan bijak (Tio Manalu & Najicha, 2022).

Konten pornografi dan kekerasan dapat menurunkan kualitas moral masyarakat serta merusak hubungan sosial antarindividu. Sementara itu, penyebaran informasi palsu atau penipuan dapat menciptakan keresahan, bahkan memperparah kondisi sosial. Hoaks yang beredar di media sosial membuat masyarakat sulit membedakan antara fakta dan opini, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dan membentuk opini publik yang salah arah.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu diambil langkah konkret dan serius. Pemerintah harus memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap konten digital yang bersifat merusak dan ilegal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya konten tidak bermoral juga sangat penting. Meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi kunci agar mereka mampu memilah informasi, membedakan mana yang benar dan salah, serta berani melaporkan konten yang merugikan.

Peran sektor teknologi digital juga tidak kalah penting. Industri ini harus membangun sistem penyaringan dan pengawasan konten yang lebih baik, serta aktif dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan beretika. Dengan dukungan semua pihak, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih sehat secara moral, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban di era digital.

Rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar dalam pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Banyak anggota masyarakat masih kesulitan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif, sehingga mereka rentan terpengaruh oleh konten yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam era digital yang berkembang pesat saat ini, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting bagi setiap individu. Masyarakat yang memiliki kemampuan digital yang baik dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas, bertanggung jawab, dan memperoleh manfaat positif darinya.

Sayangnya, tingkat kompetensi digital di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak orang yang belum memiliki akses memadai maupun pengetahuan yang cukup tentang teknologi digital. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat rentan terhadap pengaruh negatif dari konten digital seperti pornografi, kekerasan, dan penyebaran hoaks. Konten-konten tersebut mudah tersebar karena masyarakat belum mampu memilah dan menyaring informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu menyediakan akses internet yang terjangkau dan memperluas program literasi digital bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, agar generasi muda dapat mengembangkan pemahaman yang kuat mengenai dunia digital sejak usia dini.

Selain itu, peran industri media dan teknologi digital juga sangat penting. Platform digital dan media sosial perlu menyediakan edukasi serta kemudahan akses informasi yang membantu pengguna dalam menggunakan teknologi dengan bijak dan etis. Di sisi lain, pengembangan teknologi yang mampu menyaring konten negatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila juga harus terus dilakukan.

Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan era digital, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta memperoleh manfaat positif yang mendukung pembangunan bangsa.

Pengertian Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Kecerdasan Buatan (AI) merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem atau mesin yang mampu melaksanakan tugas-tugas

yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia. Dengan memanfaatkan algoritma dan model matematika, AI memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, serta membuat keputusan secara otomatis. Beberapa komponen utama dalam AI meliputi pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, dan pemrosesan bahasa alami. (Smith, 2020).

Dalam praktiknya, teknologi AI telah diterapkan secara luas di berbagai bidang, termasuk pengenalan suara dan wajah, kendaraan otonom, serta sektor kesehatan. Salah satu contohnya adalah penggunaan AI dalam mendukung diagnosis dan pengobatan penyakit serius seperti kanker, termasuk dalam terapi genetik dengan memodifikasi DNA sel atau sistem kekebalan tubuh agar lebih efektif melawan sel kanker (Johnson & Lee, 2021).

AI juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari melalui integrasinya dengan Internet of Things (IoT), yang memungkinkan pemantauan pasien secara real-time melalui sensor dan perangkat digital. Teknologi ini sangat berguna untuk pasien lansia, penderita penyakit kronis, atau pasien pasca operasi karena memungkinkan tenaga medis untuk melakukan pengawasan jarak jauh (Rahman et al., 2022).

Di bidang industri manufaktur, AI digunakan untuk mempercepat proses produksi, meningkatkan efisiensi dan kualitas, serta mengoptimalkan sistem kerja. Hal ini menjadikan AI sebagai teknologi yang sudah menyatu dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudahan akses terhadap AI melalui perangkat IoT juga turut mendorong ketergantungan banyak orang terhadap teknologi ini, baik dalam pendidikan, kesehatan, hingga industri (Chen & Kumar, 2023).

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital

Kemajuan teknologi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan agama yang berfungsi sebagai pedoman moral dalam proses pembangunan. Seharusnya, perkembangan teknologi berjalan selaras dengan nilai-nilai ini, menjadikannya sebagai mitra dalam pengambilan keputusan dan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi arah perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional berperan sebagai fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. (Wibowo & Najicha, 2022).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hasil dari perpaduan berbagai unsur agama, budaya, politik, dan ekonomi yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga memiliki orientasi yang jelas dan tidak merugikan masyarakat. Para ilmuwan perlu menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam

pengembangan ilmunya, agar teknologi yang dihasilkan tetap terikat pada nilai-nilai kebangsaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi membawa serta budaya asing ke Indonesia, yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti melemahnya penghargaan masyarakat terhadap budaya lokal. Untuk itu, penting bagi setiap individu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, agar tetap mempertahankan identitas dan karakter nasional yang kuat. Pancasila berperan penting dalam membimbing masyarakat untuk bersikap bijaksana dalam memanfaatkan teknologi, mampu membedakan hal positif dan negatif, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial (Wibowo & Najicha, 2022).

Dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), Pancasila dapat dijadikan sebagai panduan etika yang tangguh. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem AI tidak hanya memastikan etika dalam proses pengembangannya, tetapi juga memperkuat identitas nasional Indonesia dalam era globalisasi. Sebagai contoh, nilai dari sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menuntut teknologi AI untuk menekankan aspek keadilan, perlindungan privasi, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, para pengembang teknologi perlu merancang sistem yang transparan dan mudah dipahami oleh pengguna, sehingga AI dapat berfungsi tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan kultural. (Rahardja, 2022).

Pendekatan ini mencerminkan harmoni antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial, sekaligus menggambarkan aspirasi Indonesia di era digital. Dengan adanya kemajuan teknologi, kehidupan masyarakat semakin terbantu dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan mendorong mereka untuk berpikir lebih progresif, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa. (Imtiyaz & Najicha, 2022)

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Mengelola Kecerdasan AI

Kecerdasan Buatan (AI), sebagai salah satu cabang dari ilmu komputer, memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia di masa depan. Istilah "intelijen" berasal dari bahasa Latin, *intelligo*, yang berarti "saya memahami" (Bostrom, 2014). Perkembangan AI dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan utama. Tingkatan pertama adalah Artificial Narrow Intelligence (ANI), atau AI lemah, yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik, seperti dalam permainan komputer. Tingkatan kedua ialah Artificial General Intelligence (AGI), di mana AI memiliki kemampuan setara dengan manusia, memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi dengan cara yang fleksibel seperti manusia. Sedangkan tingkatan ketiga adalah Artificial Superintelligence (ASI), yang

merupakan bentuk AI dengan kecerdasan yang melampaui manusia di berbagai bidang. (Bostrom, 2014).

Menurut pendapat Russell dan Norvig (1995), pendekatan terhadap AI dapat ditinjau dari dua dimensi utama: bagaimana sistem berpikir dan bagaimana sistem bertindak. Dari kombinasi dua dimensi tersebut, muncul empat pendekatan berbeda dalam pengembangan AI, yaitu:

- Sistem yang bertindak seperti manusia (*acting humanly*): Pendekatan ini berfokus pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia melalui berbagai teknologi seperti pemrosesan bahasa alami, representasi pengetahuan, pembelajaran mesin, pengenalan visual, serta kendali melalui robotika.
- Sistem yang berpikir seperti manusia (*thinking humanly*): Fokus pada kemampuan sistem untuk meniru proses berpikir manusia, dengan cara meniru cara manusia dalam berlogika dan mengambil keputusan melalui pemrograman yang logis.
- Sistem yang berpikir secara rasional (*thinking rationally*): Sistem ini dirancang untuk beroperasi berdasarkan prinsip logika formal, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang rasional dan tepat secara sistematis.
- Sistem yang bertindak secara rasional (*acting rationally*): Kecerdasan buatan ini dikembangkan sebagai agen cerdas yang dapat memahami situasi, beradaptasi dengan lingkungan, dan mencapai tujuannya secara efisien.

Secara umum, kecerdasan buatan (AI) adalah teknologi yang berusaha meniru kecerdasan manusia dalam sistem komputer, sehingga mampu memberikan respons yang cerdas sesuai dengan konteks yang ada (Russell dan Norvig, 1995). AI telah diterapkan di berbagai bidang, meliputi linguistik, psikologi, filsafat, teknik elektro, ilmu komputer, dan ekonomi. Salah satu aplikasi yang paling dikenal adalah sistem pakar, yaitu sistem yang dirancang untuk meniru pola pikir para ahli dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan terfokus. (Pambudi et al., 2024).

Di sisi lain, dalam konteks kebangsaan Indonesia, pengembangan AI harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama asas kekeluargaan yang menekankan pada keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. AI yang dikembangkan dengan prinsip ini diharapkan mampu memperhatikan kesejahteraan keluarga sebagai unit sosial utama dalam masyarakat. Selain itu, teknologi ini juga idealnya mendorong kolaborasi antarindividu dan memperkuat integrasi sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Pengembangan model kecerdasan buatan (AI) seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Aspek

keadilan sosial serta upaya pencegahan konflik sosial menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan dalam proses desain dan implementasi teknologi ini. Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam penggunaan AI, diperlukan sistem regulasi dan mekanisme pengawasan yang ketat dan terstruktur.

AI yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila juga wajib mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta menghormati keragaman budaya di Indonesia. Dalam konteks ini, teknologi seharusnya memperkuat sistem pendidikan, memperluas distribusi pengetahuan, serta mendukung praktik demokratis dan partisipasi masyarakat, sebagaimana dijunjung dalam sila ketiga dan keempat Pancasila. Lebih dari itu, teknologi AI perlu berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Aspek penting lain yang harus diperhatikan adalah pemenuhan hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat individu, serta penciptaan kesetaraan dalam akses terhadap teknologi. Oleh sebab itu, pengembangan AI yang menghargai nilai-nilai Pancasila dan asas kekeluargaan seharusnya berfokus pada pencapaian keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan kolektif (Tzimas, 2021).

Seperti yang dijelaskan oleh Pambudi dan kolega, pemanfaatan AI dewasa ini bukanlah suatu opsi yang dapat ditunda, melainkan merupakan kenyataan yang tidak terelakkan. Kecerdasan buatan telah membuka berbagai kemungkinan, mulai dari menghubungkan manusia melalui media sosial, meningkatkan produktivitas lewat otomatisasi, hingga memajukan layanan kesehatan seperti diagnosa medis yang lebih cepat dan tepat (Pambudi et al., 2024). Meskipun demikian, laju perkembangan teknologi ini juga memunculkan tantangan etis yang signifikan. Tanpa pedoman nilai yang jelas, AI berpotensi memunculkan ketidakadilan, bias sistemik, serta pelanggaran terhadap hak dan kebebasan individu (Tzimas, 2021).

Dengan demikian, meskipun kecerdasan buatan (AI) semakin berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, pengendalian penggunaannya harus tetap berada di tangan manusia. Teknologi seharusnya dilihat sebagai alat pendukung, bukan sebagai tujuan akhir dari keberadaan manusia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi tentang pentingnya penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan disrupsi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pancasila sebagai Landasan Fundamental

Pancasila bukan sekadar dasar negara secara formal, tetapi juga merupakan fondasi ideologis, filosofis, dan moral bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal dan tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk krisis identitas, radikalisme, dan penurunan moral yang kerap diakibatkan oleh globalisasi.

- Tantangan Globalisasi dan Disrupsi

Globalisasi serta perkembangan teknologi membawa dampak signifikan terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Arus informasi yang begitu deras dan masuknya nilai-nilai asing dapat mengikis identitas bangsa. Oleh karena itu, penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk menjaga kohesi sosial dan karakter bangsa.

- Urgensi Revitalisasi dan Internalisasi Nilai Pancasila

Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara masif, sistematis, dan berkelanjutan, terutama melalui pendidikan formal maupun non-formal. Revitalisasi ini juga memerlukan kolaborasi antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan, sehingga Pancasila bukan hanya sekadar dihafal sebagai simbol, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

- Peran Generasi Muda

Generasi muda memegang peran kunci dalam menjaga keberadaan Pancasila di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, penting untuk membina karakter kebangsaan sejak dini dengan mengintegrasikan teknologi, kreativitas, dan semangat kebangsaan, agar nilai-nilai Pancasila dapat terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

Dengan demikian, penguatan Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashfiya, N. A. M. (2024). *Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional*. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 12–22.
- Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies* (1st ed.). Oxford University Press.
- Chen, R., & Kumar, S. (2023). AI in industrial automation. *International Journal of Technology and Innovation*, 15(2), 78–92.

- Darmodihardjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Generasi, P., Pendidikan, K., Ilmiah, J., Di, M., & Globalisasi, E. R. A. (2022). *Jurnal global citizen*, 1.
- Gitakarma, M. S., & Tjahyanti, P. A. S. (2022). Peranan Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam teknologi saat ini. *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, 1(1).
- Harjanto, N. S., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 30–37.
- Imtiyaz, M. N. A., & Najicha, F. U. (2022). Membangun kembali sikap nasionalisme bangsa Indonesia dalam menangkal budaya asing di era globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(2).
- Indonesia News Center. (2018, April 23). Etika jadi bagian terpenting dalam teknologi kecerdasan buatan (AI). <https://news.microsoft.com/id-id/2018/04/23/etika-jadi-bagian-terpenting-dalam-teknologi-kecerdasan-buatan-ai/>
- Indrian, J. N. A. (2024). Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 104–114.
- Johnson, M., & Lee, K. (2021). AI in medical innovations. *HealthTech Journal*, 12(3), 145–159.
- Manalu, T., & Najicha, F. U. (2022). Analisis jiwa kewarganegaraan generasi muda Indonesia di era digital serta dampaknya bagi bangsa dan negara. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 192–197.
- Moekti Prayogo, M. W., Apriono, D., Sukisno, Syahrial, M. F., Supriatna, U., & Zaki, A. (n.d.). Pelatihan pemanfaatan teknologi AI dalam pembuatan PTK bagi guru SDN Karangasem Kecamatan Jenu. *Draft Seminar Nasional Paedagoria*, Universitas Muhammadiyah Mataram. ISSN 2807-8705.
- Mubyarto. (1991). *Ideologi Pancasila dalam kehidupan ekonomi: Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa*. BP7 Pusat.
- Nasoha, A. M. (2025). Konsep dan urgensi dasar negara: Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 37–44.
- Pambudi, A. Y., Syafi'i, I., Kartikasari, D. W., Yarkhasy, A., Bulqiyah, H., & Rachmawati, L. W. (2021). Etika kecerdasan buatan dalam perspektif Pancasila, 55–72.
- Rahardja, U. (2022). Masalah etis dalam penerapan sistem kecerdasan buatan. *Technomedia Journal*, 7(2), 181–188.

- Rahman, A., Putri, N., & Sugiharto, D. (2022). Integrating IoT and AI in healthcare monitoring. *Journal of Digital Health*, 8(1), 45–60.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (1995). *Artificial intelligence: A modern approach*. Englewood Cliffs, NJ: Pearson Education, Inc.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Smith, A. (2020). *Introduction to artificial intelligence*. TechPress.
- Tzimas, T. (2021). *Legal and ethical challenges of artificial intelligence from an international law perspective*. Aristotle University of Thessaloniki.
- Wibowo, K. A., & Najicha, F. U. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 4(1), 22–31.